KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : PAN Berencana Mundur Dari Panitia Angket
Tanggal : Jumat, 28 Juli 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 10

PAN Berencana Mundur dari Panitia Angket

Masukan dari publik akan menjadi bahan pertimbangan.

Agung Sedayu
Agung_s@tempo.co.id

JAKARTA – Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, mengatakan partainya berencana mundur dari Panitia Angket Komisi Pemberantasan Korupsi. Dewan Pimpinan Pusat PAN telah memerintahkan fraksi dan tiga anggota PAN yang ada di Panitia Angket melakukan evaluasi kinerja Panitia Angket. "Kecenderungan kuat untuk menarik diri itu ada," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Hak angket lahir berkaitan dengan kasus korupsi dalam proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (*e-KTP*). Komisi Hukum DPR menginginkan KPK membuka rekaman pemeriksaan politikus Hanura, Miryam S. Haryani, dalam perkara yang merugikan negara Rp 2,3 triliun ini. Dalam pemeriksaan itu, Miryam mengatakan ditekan enam anggota Komisi . Hukum DPR agar mengatakan tidak ada pembagian uang *e-KTP* di Dewan. Belakangan, sikap Miryam berubah dan mengklaim ditekan penyidik KPK agar mengatakan hal itu. Meski diwarnai penolakan beberapa fraksi, pada 24 April lalu rapat paripurna DPR mengesahkan hak angket KPK.

Yandri mengatakan sudah ada laporan kinerja Panitia Angket yang masuk ke DPP. Dari laporan sementara itu, Yandri menambahkan, arahnya menuju keputusan PAN untuk mundur dari Panitia Angket. "Kami menganggap Panitia Angket ingin melemahkan KPK, padahal PAN bergabung dengan niat untuk memperkuat KPK," ujarnya.

Selain hasil evaluasi internal, PAN akan mempertimbangkan masukan dari publik. Bila masyarakat menilai Panitia Angket tidak obyektif dan ditunggangi kepentingan lain, PAN akan mundur. "Kami tidak mau terjebak di situ (Panitia Angket)," tuturnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra telah memutuskan mundur dari Panitia Angket. Gerindra beralasan mereka mundur karena kinerja Panitia Angket tidak efektif dan berpotensi melemahkan KPK. "Ada proses pembusukan politik terhadap kelembagaan KPK. Itu yang bagi kami tidak bisa kami terlibat jauh di dalamnya," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Desmond J. Mahesa.

Pada awal pembahasan hak angket, Gerindra dan PAN menyatakan tidak setuju. Namun ketika rapat paripurna memutuskan hak angket jalan terus, mereka memutuskan bergabung dan mengirim wakilnya ke Panitia Angket. Senin lalu, Gerindra kembali berubah sikap dan menyatakan keluar dari Panitia Angket. Sikap itu tampaknya bakal diikuti PAN.

Bila PAN memutuskan mundur, Panitia Angket hanya tinggal beranggotakan lima fraksi, yaitu Fraksi Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, NasDem, dan Hanura. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa menolak pansus ini sejak awal serta tidak mengirim wakil mereka ke Panitia Angket.

Toh, Wakil Ketua Panitia Angket KPK, Masinton Pasaribu, mengatakan Panitia Angket tidak akan terpengaruh bila ada partai yang mundur. "*Gak* ada (pengaruhnya). Kami tetap jalan," katanya, kemarin.

TEMPO/DHEMAS REVIYANTO ATMODJO



Rapat Pansus Angket KPK di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Juni lalu.

● AHMAD FAIZ | IRSYAN HASYIM